



## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2010

### A. PENDAHULUAN

Dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, dan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan ketentuan pelaksanaannya dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum maka Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran karyawan PT Bank Commonwealth mempunyai komitmen yang tinggi dan teguh dalam mengelola usaha dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

Sebagai upaya dalam menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, PT Bank Commonwealth secara berkala melakukan *Self Assessment* secara komprehensif terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* menyangkut 11 (sebelas) aspek penilaian untuk memantau dan mengevaluasi hasil pengimplementasiannya serta merencanakan suatu tindakan (*action plan*) dan melakukan tindakan korektif (*corrective action*) bila diperlukan.

### B. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan selama 8 (delapan) kali selama 2010 yang kemudian dituangkan dalam Akta sebagai berikut:

1. Akta No.55 tanggal 20 April 2010 berisi antara lain:
  - Menyetujui pengangkatan Geoffrey David Coates selaku Presiden Komisaris
  - Menyetujui pengangkatan Antonio Da Silva Costa selaku Presiden Direktur.
  - Menyetujui pengangkatan Andriaan Laoh selaku Wakil Presiden Direktur.
2. Akta No. 51 tanggal 18 Mei 2010 berisi antara lain:
  - Menyetujui pengangkatan kembali Craig Anthony Carland sebagai wakil Presiden Komisaris.
  - Menyetujui pengangkatan kembali Jeffrey Turangan sebagai Komisaris Independen.
3. Akta No. 19 tanggal 7 Juli 2010 berisi antara lain:  
Menyetujui pengangkatan kembali Franciskus Antonius (Alijoyo) sebagai Komisaris Independen.
4. Akta No.20 tanggal 7 Juli 2010 berisi antara lain:  
Menyetujui pengangkatan kembali Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PriceWaterhouseCoopers) sebagai Auditor Independen untuk mengaudit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan syarat-syarat penunjukkan kembali tersebut.
5. Akta No. 78 tanggal 20 Juli 2010 berisi antara lain (berdasarkan persetujuan BI):
  - Menyetujui pengangkatan Antonio Da Silva Costa sebagai Presiden Direktur.
  - Menyetujui pengunduran diri Malakai Ratu Tanicuvu Naiyaga sebagai Direktur.
  - Menyetujui pengunduran diri Michael Paul Jarman sebagai Direktur.
6. Akta No. 25 tanggal 4 Agustus 2010 berisi antara lain (berdasarkan persetujuan BI):  
Menyetujui pengangkatan Geoffrey David Coates sebagai Presiden Komisaris

7. Akta No.52 tanggal 15 Desember 2010 berisi antara lain:  
Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dan disetor sebesar Rp 221.000.000.000 (dua ratus dua puluh satu milyar rupiah).
8. Akta No. 53 tanggal 15 Desember 2010 berisi antara lain:  
Menyetujui pengunduran diri Preditha Dewi sebagai Direktur.

**C. DEWAN KOMISARIS dan KOMITE-KOMITE**

**1. Susunan keanggotaan Dewan Komisaris per Desember 2010**

Keanggotaan Dewan Komisaris PT Bank Commonwealth telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia dalam hal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh Bank Indonesia, larangan perangkap jabatan dan juga keberadaan Komisaris Independen.

Struktur Dewan Komisaris per Desember 2010 adalah sebagai berikut :

No.	Dewan Komisaris	Jabatan
1	Geoffrey David Coates	Presiden Komisaris
2	Craig Anthony Carland	Wakil Presiden Komisaris
3	Jeffrey Turangan	Komisaris Independen
4	Franciskus Antonius (Alijoyo)	Komisaris Independen

**2. Status Independensi Dewan Komisaris**

Sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum maka seluruh anggota Dewan Komisaris Commonwealth Bank tidak saling memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi atau hubungan lain.

Dengan demikian Komisaris Independen dalam hal melakukan tugas dan tanggung jawabnya tidak ada yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

**3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT Bank Commonwealth**

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memastikan setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi telah melakukan dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- b. Dewan Komisaris secara aktif melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan nasihat serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- c. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil Pengawasan Bank Indonesia dan/atau pengawasan otoritas lainnya.
- d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- e. Sesuai Peraturan Bank Indonesia, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Sampai dengan Desember 2010 telah terbentuk 3 (tiga) Komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

4. Rapat Dewan Komisaris

Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi telah dilaksanakan secara berkala selama periode tahun 2010 dan hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Rapat Dewan Komisaris selama periode tahun 2010 telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dan rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali.

No.	Anggota	Jabatan	Periode			
			Maret	Juli	Oktober	Desember
1	Geoffrey David Coates	Presiden Komisaris	-	-	✓	✓
2	Garry Lynton Mackrell	Presiden Komisaris	✓	✓	-	-
3	Craig Anthony Carland	Komisaris	✓	✓	✓	✓
4	Jeffrey Turangan	Komisaris Independen	✓	✓	✓	✓
5	Franciskus Antonius (Alijoyo)	Komisaris Independen	✓	✓	✓	✓

5. Komite-Komite

Komite-komite yang telah terbentuk dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab adalah :

a). Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut :

No.	Komite Audit	Jabatan
1	Franciskus Antonius (Alijoyo)	Ketua merangkap anggota (Komisaris Independen)
2	Paul Hamilton	Anggota (Pihak Independen)
3	Craig Anthony Carland	Anggota

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

- 1) Komite Audit bertugas untuk melakukan penelaahan atas rencana kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasilnya.
- 2) Memberikan masukan secara independen kepada Dewan Komisaris terhadap penerapan *Good Corporate Governance* dalam kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku.
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

## b). Komite Pemantau Risiko

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

No.	Komite Pemantau Risiko	Jabatan
1	Jeffrey Turangan	Ketua merangkap anggota (Komisaris Independen)
2	Paul Hamilton	Anggota (Pihak Independen)
3	Craig Anthony Carland	Anggota
4	Franciskus Antonius (Alijoyo)	Anggota

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagai berikut :

- 1) Melakukan penelaahan dan penilaian atas efektifitas dan kepatuhan penerapan kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 2) Melakukan pemantauan dan penelaahan pelaksanaan tugas dari Komite Manajemen Risiko dan unit-unit kerja Manajemen Risiko dalam hal memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 3) Memantau perkembangan perkara litigasi yang melibatkan bank serta melakukan penelaahan atas risiko-risiko yang diakibatkan oleh risiko hukum, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.

## c). Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

No.	Remunerasi dan Nominasi	Jabatan
1	Jeffrey Turangan	Ketua merangkap anggota (Komisaris Independen)
2	Craig Anthony Carland	Anggota
3	Richard Indrakusuma	Anggota

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut :

Telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi dan nominasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:

- 1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Prestasi kerja individual.
- 3) Kewajaran dengan *peer group*.
- 4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

**D. DIREKSI****1. Susunan keanggotaan Direksi per Desember 2010**

Keanggotaan Direksi PT Bank Commonwealth telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia dalam hal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh Bank Indonesia, larangan perangkapan jabatan, tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang bisa mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dan seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

Jumlah anggota Direksi per Desember 2010 adalah sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu 1 orang Presiden Direktur dan 2 (dua) orang Direktur dimana salah satu Direktornya sebagai Direktur Kepatuhan.

Dengan demikian, struktur Direksi per Desember 2010 adalah sebagai berikut :

No.	Direksi	Jabatan
1	Antonio Da Silva Costa	Presiden Direktur
2	Andriaan Laoh	Wakil Presiden Direktur
3	Tuti Hartini	Direktur Kepatuhan

**2. Status Independensi Direksi**

Sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia maka seluruh anggota Direksi PT Bank Commonwealth tidak saling memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi lainnya dan/atau Dewan Komisaris.

**3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dan mengelola usaha sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan jenjang organisasi.
- c. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan-temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, Auditor Eksternal, hasil Pengawasan Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya.
- d. Direksi mengembangkan dan memastikan penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan diseluruh jenjang organisasi serta memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

**E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN**

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum maka PT Bank Commonwealth telah menunjuk dan menugaskan salah seorang Direksi untuk menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dengan tugas dan tanggung jawab memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dan patuh pada Peraturan



Bank Indonesia dan ketentuan pelaksanaannya dalam Surat Edaran Bank Indonesia serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

#### FUNGSI KEPATUHAN

Selama tahun 2010 untuk meningkatkan penerapan fungsi kepatuhan termasuk Penerapan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Melakukan kajian kepatuhan untuk memberikan saran, masukan dan rekomendasi terhadap *draft* Kebijakan dan Prosedur pengembangan produk dan aktivitas baru dan/atau Kebijakan Internal lainnya
2. Memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan APU/PPT, analisa, evaluasi dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan dan transaksi keuangan tunai sesuai ketentuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (*PPATK*).
3. Memantau dan memastikan pelaksanaan terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat dengan Bank Indonesia dan/atau otoritas lain. Serta memastikan bahwa semua laporan kemajuan dan tindakan perbaikan telah dikirim ke Bank Indonesia dan/atau otoritas lain sesuai waktu yang dijanjikan.
4. Memberikan pelatihan dan sosialisasi pemahaman APU/PPT kepada karyawan baru dan *refreshing training* kepada garda depan (*front liner*).
5. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengkinian data dalam rangka penerapan APU/PPT.
6. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia setiap semester.

#### FUNGSI AUDIT INTERN

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Sesuai dengan Piagam Audit Intern, SKAI melaksanakan fungsi audit intern secara independen dan objektif atas desain dan implementasi *governance, risk and control* pada satuan kerja operasional (*auditee*).

Cakupan audit intern meliputi seluruh aktivitas Bank. SKAI memiliki otoritas secara keseluruhan, bebas dan tidak terbatas atas setiap dan seluruh data, dokumentasi dan properti Bank termasuk pegawai yang berkaitan dengan area yang diperiksa. SKAI juga memiliki akses yang bebas dan tidak terbatas kepada Dewan Komisaris.

Laporan hasil audit intern disampaikan kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dan *auditee* dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Pelaksanaan rencana tindak lanjut yang menjadi komitmen *auditee* sebagai resolusi / perbaikan atas temuan audit dipantau dan dilaporkan secara berkala kepada *auditee*, Presiden Direktur, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

#### FUNGSI AUDIT EKSTERN

Sesuai rekomendasi dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham dan dalam keputusan rapat telah disetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Price Waterhouse Coopers sebagai auditor ekstern yang independen dan profesional serta wajib menjaga rahasia bank untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT Bank Commonwealth untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2010.



Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan merupakan Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia dan tidak memberikan jasa lain kepada PT Bank Commonwealth sehingga terhindar dari benturan kepentingan.

#### F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memahami risiko yang dihadapi oleh bank dan telah melakukan review, pengawasan yang melekat terhadap risiko bisnis secara berkesinambungan. Unit Manajemen Risiko secara tepat waktu menyampaikan laporan pemantauan atas seluruh eksposur risiko kepada manajemen, direksi dan komisaris untuk dikaji guna menunjang pelaksanaan pengawasan risiko.

Bank memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang mengatur pelaksanaan identifikasi, penilaian, pengendalian dan pengawasan atas risiko-risiko di lingkungan Bank. Kebijakan manajemen risiko bank disusun sesuai dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan SDM, dan *risk appetite* Bank.

Beberapa tindakan telah dilakukan dalam penerapan manajemen risiko antara lain peningkatan budaya manajemen risiko dalam usaha bank untuk tetap terus berlangsung, pengembangan dan peningkatan proses dan prosedur seperti namun tidak terbatas pada area kredit, serta pelaksanaan *Control Self Assessment* di unit-unit Bank secara bertahap.

#### G. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) per tanggal 31 Desember 2010 sebagai berikut :

No	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH DEBITUR	NOMINAL (dalam jutaan rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	27	313.842
2	Large Exposure	Total :	Total Rp.
	a. Debitur Individu	a. 50	a. 1.015.681
	b. Debitur Group	b. 16	b. 228.117

Pelaksanaan ketentuan ini selalu dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking*) dengan tetap mengacu pada Ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Sepanjang periode tahun 2010 PT Bank Commonwealth tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut dan pelaporannya ke Bank Indonesia.

#### H. RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana Bisnis Bank disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, realistis dan terukur serta senantiasa dilakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala dalam hal pencapaiannya. Dan selama periode tahun 2010 PT Bank Commonwealth telah berhasil meningkatkan kinerjanya dibanding tahun sebelumnya. Sejumlah target berhasil dicapai seperti penyaluran kredit, penghimpunan dana, penurunan ratio NPL.

**I. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK**

Informasi Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan telah disampaikan ke Bank Indonesia tepat waktu dan Lembaga-lembaga terkait.

Bank juga telah menyajikan informasi mengenai Laporan Keuangan tersebut pada *Home Page* PT Bank Commonwealth ([www.commbank.co.id](http://www.commbank.co.id)) sehingga dapat diakses dan diketahui dengan mudah oleh seluruh *Stakeholder*.

**J. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

a. Informasi mengenai jumlah Remunerasi dan Fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Commonwealth selama tahun 2010 sebagai berikut :

Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Sepanjang Tahun 2010			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan rupiah	Orang	Jutaan rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiens dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	570	6	7.000
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura	2	18	6	78
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>588</b>	<b>6</b>	<b>7.078</b>

b. Informasi mengenai jumlah Remunerasi (yang diterima secara tunai sebelum dipotong pajak penghasilan) per orang yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Commonwealth selama tahun 2010 sebagai berikut :

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 (satu) tahun Periode Tahun 2010	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
• Di atas Rp. 3 milyar	-	-
• Di atas Rp. 2 milyar sd Rp. 3 milyar	2	-
• Di atas Rp. 1 milyar sd Rp. 2 milyar	2	-
• Di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 milyar	2	-
• Di bawah Rp. 500 juta	-	2

Note : Jumlah Direksi per akhir Desember 2010 adalah 3 (tiga) orang

**K. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH**

Informasi mengenai perbandingan atau rasio gaji tertinggi dan terendah yang diterima anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai (pegawai tetap sampai level pelaksana) perbulan adalah sebagai berikut :



LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Keterangan	Rasio
Ratio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	40 : 1
Ratio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	3 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi dan terendah	1,4 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1,2 : 1

**L. SHARES OPTION**

Sepanjang tahun 2010 PT Bank Commonwealth belum memiliki program opsi untuk membeli saham bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Kepala Unit Kerja Lainnya.

**M. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)**

Berikut adalah jumlah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh Pengurus, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap termasuk honorer dan/atau *outsourcing* sebagai berikut :

Internal Fraud Sepanjang Tahun 2010	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	0	0	1	1	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	1*	0	0
Dalam proses penyelesaian di Internal Bank	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di Internal bank & customer	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	0	0	1	0	0	0

\*) Sudah diselesaikan pada 28 Februari 2011

**N. PERMASALAHAN HUKUM**

Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi PT Bank Commonwealth yang telah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta yang masih dalam proses penyelesaian per posisi 31 Desember 2010 sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

a. PT Bank Commonwealth sebagai Penggugat / Pelapor :

Permasalahan Hukum	Jumlah Permasalahan Hukum	
	Pidana	Perdata
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)		
• Rp. 101 juta sd Rp. 500 juta	1	5
• Diatas Rp. 500 juta	-	-
Dalam Proses Penyelesaian		
• Rp. 101 juta sd Rp. 500 juta	3	5
• Diatas Rp. 500 juta	2	4
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>14</b>

b. PT Bank Commonwealth sebagai Tergugat / Terlapor :

Permasalahan Hukum	Jumlah Permasalahan Hukum	
	Pidana	Perdata
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)		
• Rp. 101 juta sd Rp. 500 juta	-	-
• Diatas Rp. 500 juta	-	1
Dalam Proses Penyelesaian		
• Rp. 101 juta sd Rp. 500 juta	-	1
• Diatas Rp. 500 juta	-	2
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>4</b>

O. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PT Bank Commonwealth telah mempunyai Kebijakan dalam penanganan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yaitu *Conflict of Interest Policy* yang mengatur transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kepentingan seluruh pegawai.

P. BUYBACK SHARE DAN BUYBACK OBLIGASI BANK

PT Bank Commonwealth tidak memiliki transaksi dan/atau kegiatan *Buyback Share* dan *Buyback Obligasi Bank*.

Q. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK SELAMA TAHUN 2010

a. Kegiatan Sosial

Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan masyarakat maka PT Bank Commonwealth turut aktif berkontribusi dengan berfokus pada pengembangan bidang pendidikan, kesehatan, olahraga dan konservasi lingkungan hidup di Indonesia.

Beberapa kegiatan sosial yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2010 dapat dijabarkan sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

No	Jenis Program dan Tujuan Penggunaan	Penerima Dana	Jumlah Nominal
1	Mencari tokoh wanita yang telah berperan dalam merubah kehidupan bagi masyarakat sekitar.	1. Setiaji Wibowo & Yohana Sulastri 2. Esti Murdani & Wahyu Setiarini	IDR 70.000.000
2	Institut Golf Commonwealth Bank untuk menggali potensi pegolf-pegolf muda.	8 pemain golf junior dibawah usia 18 tahun	IDR 368.828.000
3	Kesejahteraan Sosial ANZA - Mendukung program pengembangan dan pendidikan anak yang tidak mampu untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat miskin.	ANZA ( <i>Australian and New Zealand Association</i> )	IDR 37.600.000
4	Yayasan Senyum - Membantu Pasien Bibir Sumbing.	Yayasan Grand Hyatt	IDR 84.600.000
5	Program Terumbu Karang - Pelestarian Terumbu Karang.	Yayasan Terumbu Karang Nusa Dua	IDR 8.300.000

b. Kegiatan Politik

Dalam kurun waktu tahun 2010 tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan Politik.

R. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG

Perhitungan *Nilai Komposit* dalam melakukan Self Assessment GCG telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia untuk periode tahun 2010 yang meliputi 11 (sebelas) aspek penilaian dengan ringkasan sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai	Penjelasan
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	10%	1	0.10	Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris telah sesuai ketentuan PBI dan mampu mengambil keputusan secara independen serta melaksanakan tugas-tugasnya sesuai prinsip-prinsip GCG. Penyelenggaraan rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi	20%	1	0.20	Jumlah, kompetensi, integritas dan komposisi anggota Direksi telah sesuai dengan kapasitas dan kompleksitas usaha yang ada saat ini. Anggota Direksi mampu bertindak dan

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

					mengambil keputusan secara intern dan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya telah memenuhi prinsip-prinsip kepatuhan dan GCG. Penyelenggaraan rapat telah dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10%	1	0.10	Komposisi dan kompetensi anggota-anggota komite yang telah terbentuk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat komite telah dijalankan serta dihadiri oleh anggota sesuai ketentuan.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	1	0.10	Potensi terjadinya Benturan Kepentingan dapat diatasi dan diminimalkan dengan melalui Kebijakan-kebijakan yang wajib ditaati oleh seluruh stakeholder.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5%	1	0.05	Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai komitmen bersama untuk meningkatkan dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Bank telah mempunyai Direktur Kepatuhan yang telah melalui Fit dan Proper test Bank Indonesia. Temuan audit Bank Indonesia terkait kepatuhan dan prinsip mengenal nasabah telah ditindaklanjuti dan akan selalu menjadi perhatian dalam pelaksanaan.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5%	1	0.05	Pelaksanaan Fungsi Audit Intern telah berjalan efektif sesuai dengan Standard Minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5%	1	0.05	Pelaksanaan Fungsi Audit Extern dilaksanakan oleh Akuntan Publik / KAP yang independen dan telah memenuhi kriteria yang ditentukan.



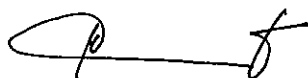
LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.5%	2	0.15	Manajemen risiko masih dan akan terus-menerus mengidentifikasi dan mengendalikan risiko Bank. Manajemen aktif melakukan pemantauan dan memperbaiki kebijakan, prosedur untuk senantiasa memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( <i>related party</i> ) dan Penyediaan Dana Besar ( <i>large exposure</i> )	7.5%	1	0.08	Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait ( <i>related party</i> ) dan penyediaan dana besar ( <i>large exposure</i> ) dalam pelaksanaannya termasuk dalam pengambilan keputusan telah dilaksanakan dengan baik dan terkendali sesuai ketentuan yang berlaku.
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	15%	2	0.30	Laporan Keuangan dan Non Keuangan telah disampaikan secara transparan dan mudah untuk diakses oleh stakeholder melalui media dan homepage. Laporan pelaksanaan GCG telah sesuai dengan ketentuan berlaku.
11	Rencana Strategis Bank	5%	1	0.05	Penyusunan Rencana Strategis bank telah dibuat dan disampaikan kepada Bank Indonesia. Rencana tersebut menjadi acuan dalam menjalankan usaha bank.
<b>Total Nilai Komposit</b>		<b>100%</b>		<b>1.23</b>	<b>SANGAT BAIK</b>

S. Penutup

Demikianlah Laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* ini kami buat, selanjutnya bimbingan serta pengarahan Bank Indonesia senantiasa kami harapkan guna perbaikan implementasi *Good Corporate Governance* di Bank kami.

PT Bank Commonwealth



**Antonio Da Silva Costa**  
Presiden Direktur



**Geoffrey David Coates**  
Presiden Komisaris